

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN SAWAH IRIGASI  
UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PADI DI PROVINSI JAMBI.**

**USE OF IRRIGATION NETWORK OPTIMIZATION FOR IMPROVEMENT OF  
RICE PRODUCTION IN JAMBI PROVINCE**

*Nur Imdah Minsyah, Araz Meilin dan Endrizal*

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi  
Jl. Samarinda Paal Lima Kotabaru, Jambi  
Email:nurimdah@yahoo.co.id  
Hp.081274248990*

**ABSTRAK**

*Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Sawah Irigasi Untuk Peningkatan Produksi Padi di Provinsi Jambi.* Makalah ini bertujuan memaparkan perkembangan luas sawah irigasi, tingkat pemanfaatan dan permasalahannya di Provinsi Jambi. Metodenya adalah survey, observasi langsung dan wawancara dengan petani pengguna air, petugas lapang dan aparat dinas terkait. Provinsi Jambi memiliki 112.412 ha yang dapat dijadikan sebagai lahan irigasi. Dari luas tersebut yang telah direklamasi 52.184 ha. Secara aktual berdasarkan perhitungan BPS, luas lahan sawah yang beririgasi berfluktuasi. Pada tahun 2012, total luas sawah irigasi di Provinsi ini 41.340ha, terdiri 3.429 ha irigasi teknis, 20.313 ha irigasi desa non PU, selebihnya semi teknis dan sederhana. Pemanfaatan sawah irigasi belum optimal, dari 3.435 ha lahan sawah irigasi teknis yang ditanami padi 3 kali per hanya 178 ha atau 5.18 %, yang tidak ditanam padi dan sementara waktu tidak diusahakan 1.443 ha dan 5851 ha. Belum optimalnya pemanfaatan lahan sawah irigasi disebabkan oleh dua hal yaitu adanya penurunan debit air dan rusaknya jaringan irigasi. Agar lahan sawah irigasi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal perlu dilakukan rehabilitasi, pempanisasi dan Revitalisasi Serta pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

-----  
Kata Kunci : Jaringan irigasi, Produksi padi, Revitalisasi dan Pemberdayaan P3A

**ABSTRACT**

Optimizing Utilization Network For Improvement Rice Production in Jambi Province. Jambi has 112.412 ha of land that can be used as irrigation. This paper aims to describe the development of irrigated rice area, the utilization and problems in Jambi Province That area reclaimed as 52 184 ha of irrigated land . In actual calculations based on BPS, the area of irrigated rice fields fluctuate . In 2012 , the total area of irrigated rice fields in the province 41.340 ha, which is technically classified as irrigated rice only 3,429 ha or 8.28 % , and those classified as non- irrigated village pu 20 313 ha or 49.03 % . The rest in the form of semi- technical irrigation and simple . Has not been optimal utilization of irrigated rice . This is evident from the widespread planting of rice and not at the time being cultivated quite significant . In the year 2012 which is not widely planted rice and cultivated temporarily each reached 1,443 ha and 5851 ha . In addition , 3,435 ha of irrigated land is planted rice technically 3 times a year only 178 ha or 5.18 % . Has not been optimal utilization of irrigated land caused by two factors: a decrease in water flow and damage to the irrigation network . In order for the existing irrigation network can be used optimally necessary rehabilitation , pumping and Revitalization And Water User empowerment Farmers Association ( P3A ).

-----  
**Keywords : Network irrigation , rice production , Revitalization and Empowerment of P3A**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor pertanian masih ditempatkan sebagai sektor yang mendapat prioritas dengan skala tinggi dalam pembangunan bidang perekonomian secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan perannya dalam penyediaan pangan, pakan, energi, sebagai penyerap tenaga kerja, menjadi mata pencaharian pokok bagi penduduk di pedesaan, posisinya yang sangat strategis etgis dalam pengentasan kemiskinan, berperan secara signifikan dalam pembentukan PDRB dan sebagai penghasil devisa bagi negara (Simatupang, dkk. 2002).

Beras merupakan komoditas pangan terpenting dan menduduki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Pertama, beras merupakan bahan makanan pokok bagi lebih dari 90 % penduduknya (Saliem, dkk. 2005). Kedua, tingkat ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan baik dan dapat diakses oleh penduduknya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang akan sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga beras sering dianalogikan sebagai komoditas politis (Arifin, 2006, dan Arintadisastra. 2001).

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas swasembada beras dapat diartikan adanya tuntutan atau keharusan meningkatkan produksi minimal seimbang dengan peningkatan permintaan (konsumsi) seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dalam hal ini, Kementerian Pertanian dalam rencana strategisnya 2009 – 2014 menargetkan pertumbuhan produksi padi rata-rata 3.22 %/th (Kementan 2009). Dengan basis data produksi tahun 2009, target produksi yang hendak dicapai pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 70,75 juta ton.

Agar peningkatan produksi padi itu sendiri tercapai memerlukan system pendukung (*supporting system*), Salah satu dari bagian system pendukung tersebut ketersediaan air dalam jumlah yang cukup, waktu dan tepat, bila tidak proses pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu yang berakibat produksi baik secara kuantitas maupun kualitas rendah (Fajar. 2013)

Ketersediaan, efektivitas dan efisiensi infrastruktur jaringan irigasi yang memadai adalah sangat dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan air di negara kita sangat khas, melimpah pada bulan-bulan basah karena curah hujan yang tinggi dan kekurangan pada bulan-kering. (Direktorat Pengelolaan Air. 2014). Lebih lanjut dikemukakan dengan adanya jaringan irigasi, air yang melimpah pada bulan-bulan basah dapat ditampung, sehingga bisa mencegah banjir, selain .Selain untuk mencegah terjadinya banjir, adanya jaringan irigasi juga dapat membantu petani terutama di saat kekeringan.

Pemberian air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream ) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai berupa: bendungan, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan - bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Sarana dan prasarana jaringan irigasi tersebut merupakan satu kesatuan , bila terjadi kerusakan bagian tertentu akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun. (Direktorat jendral sumber daya air, 2013).

Seperti halnya dengan provinsi-provinsi lain, di Provinsi Jambi pun terdapat bulan-bulan basah dengan curah hujan dan debit yang cenderung melimpah dan bulan kering dengan debit air yang rendah. Tikno (2000), mengemukakan dari lima Sub Das (Batanghari Hulu, Batang Tebo, Batang Tabir, Batang Merangin – Tembesi, dan Batanghari Hilir) yang dilakukan pengukuran debit airnya, debit air tinggi terjadi pada Bulan Desember dan Januari dan yang terendah terjadi pada bulan Agustus. Untuk mengoptimalkan ketersediaan air tersebut, telah dibangun beberapa jaringan irigasi.

## **1.2. Tujuan**

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari : 1). Potensi dan penyebaran lahan sawah irigasi di Provinsi Jambi, dan; 2). Pemanfaatan dan permasalahannya.

## **II. METODOLOGI**

Pengkajian ini dilaksanakan di Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Barat dan Kerinci. Pendekatan yang digunakan adalah mengadakan observasi langsung pada satu daerah irigasi teknis dan setengah teknis tergantung dari masing-masing kabupaten. Untuk Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kerinci Daerah irigasi yang diobservasi adalah Daerah irigasi Teknis, sedangkan di Kabupaten Bungo daerah irigasi semi teknis. Analisisnya berupa analisis deskriptif kualitatif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Potensi dan Penyebaran Lahan Sawah Irigasi**

Provinsi Jambi memiliki lahan yang cukup luas untuk dijadikan sebagai lahan irigasi, yaitu 112.412 ha, dari luas tersebut yang telah dikembangkan sebagai lahan sawah irigasi 52.184 (Direktorat Jendral Sumberdaya Air, Kementrian PU, 2013). Berdasarkan klasifikasinya, lahan sawah irigasi di Provinsi Jambi terdiri dari lahan sawah irigasi teknis, lahan sawah irigasi setengah teknis, lahan sawah irigasi sederhana, dan lahan sawah irigasi desa non pekerjaan umum (PU).

Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang pengairannya berasal dari jaringan irigasi teknis, sedangkan jaringan irigasi teknis itu sendiri adalah Jaringan irigasi yang mempunyai bangunan sadap permanen yang mampu mengatur dan mengukur ketinggian permukaan air di saluran, dan terdapat saluran pemasukan dan pengeluaran..

Lahan sawah irigasi semi teknis adalah lahan sawah yang yang pengairannya berasal dari jaringan irigasi semi teknis, irigasi semi teknis itu sendiri adalah Jaringan irigasi yang memiliki bangunan sadap yang permanen ataupun semi permanen, umumnya sudah dilengkapi dengan bangunan pengambil dan pengukur,, namun sistem pembagiannya belum sepenuhnya mampu mengatur dan mengukur, sehingga pengorganisasiannya lebih rumit.

Lahan sawah irigasi sederhana adalah lahan sawah yang pengairannya bersumber dari jaringan irigasi sederhana, irigasi sederhana itu sendiri adalah Jaringan irigasi yang

kelengkapan maupun kemampuan dalam mengukur dan mengatur masih sangat terbatas. Ketersediaan air biasanya melimpah dan mempunyai kemiringan yang sedang sampai curam, sehingga mudah untuk mengalirkan dan membagi air. Jaringan irigasi sederhana mudah diorganisasikan karena menyangkut pemakai air dari latar belakang sosial yang sama. Namun jaringan ini masih memiliki beberapa kelemahan antara lain; terjadi pemborosan air karena banyak air yang terbuang.

Lahan sawah irigasi desa non PU adalah lahan sawah yang pengairannya bersumber dari jaringan irigasi desa non PU, jaringan irigasi desa non Pu itu sendiri adalah jaringan irigasi yang diusahakan secara mandiri oleh kelompok tani, tidak memiliki bangunan air, salurannya sangat sederhana tidak berbeton, pengendalian air sangat sederhana berupa pembuatan pintu-pintu tabat.

Luas sawah yang berpengairan teknis menunjukkan kecenderungan yang semakin berkurang, hal ini merupakan refleksi dari kemampuan jaringan irigasi teknis untuk mengairi sawah semakin berkurang. Sedangkan jaringan irigasi semi teknis cakupan sawah yang terairi menunjukkan kecenderungan yang semakin luas, terakhir jaringan irigasi sederhana cakupan sawah yang diairinya berfluktuasi. Jaringan irigasi teknis menunjukkan bahwa kondisi jaringan irigasi teknis yang pembangyan dibangun oleh pemerintah secara relative masih sedikit teknis secara relatif

Tabel 1. Perkembangan luas sawah irigasi di Provinsi Jambi, 2007 – 2011.

Tahun	Irigasi (ha)				Lainnya <sup>a)</sup> (ha)	Total (ha)
	Teknis	1/2 Teknis	Sederhana	Jumlah		
2007	4113	10031	8309	22453	-	-
2008	4195	10025	6657	20877	158392	179179
2009	3517	10116	5932	19565	157758	177323
2010	3429	10771	6820	21020	145625	166645
2011	3375	10546	8671	22592	147003	169595

Sumber : BPS Provinsi Jambi (2009 dan 2013) diolah (2014)

Ket : a). terdiri dari irigasi desa/non PU, Tadah Hujan, Pasang surut, Lebak, dan folder lainnya

Tabel 2. Penyebaran lahan sawah irigasi di Provinsi Jambi berdasarkan klasifikasi teknisnya.

No.	Kabupaten/Kota	Klasifikasi Jaringan Irigasi (ha)				Jumlah
		Teknis	Semi teknis	Sederhana	Desa non PU	
1.	Kerinci	1.295	4.162	1.750	5.147	12.354
2.	Merangin	-	2.211	2.137	5.125	9.473
3.	Sarolangun	-	232	1.151	1.456	2.839
4.	Batanghari	-	305	-	54	359
5.	Muara Jambi	250	70	120	2.819	3.259
6.	Tanjab Timur	-	-	-	-	-
7.	Tanjab Barat	1.185	421	-	230	1.836
8.	Tebo	600	-	-	1.130	1.730
9.	Bungo	-	2.655	1.174	2.027	5.856
10.	Kota Jambi	-	-	-	371	371
11.	Kota Sungai Penuh	99	715	488	1.354	2.656
<b>Jumlah</b>		<b>3.429</b>	<b>10.771</b>	<b>6.820</b>	<b>20.313</b>	<b>40,733</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2011

Suatu kesatuan wilayah yang mendapat kan air dari suatu jaringan irigasi disebut dengan Daerah Irigasi. Di Provinsi Jambi terdapat 96 Daerah Irigasi (DI) yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota. Secara rinci daerah irigasi berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Penyebaran daerah irigasi di Kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi.

No.	Kabupaten/kota	Daerah irigasi
1.	Kerinci	33
2.	Bungo	26
3.	Sarolangun	9
4.	Merangin	15
5.	Tebo	9
6.	Tanjab Barat	3
7.	Batanghari	1
<b>Jumlah</b>		<b>96</b>

Sumber : Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementrian PU. 2013.

### 3.2. Batasan Wewenang dan Tanggung Jawab pengelolaan

Batasan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mengenai pengelolaan jaringan irigasi tertuang dalam Bab IV pasal 16, 17 dan 18 pada Peraturan Pemerintah Republik No 20 tahun 2006. Dearah Irigasi dengan luas 3000 ha pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, Daerah Irigasi dengan luas antara 1000 ha - 3000 ha pengelolaannya

menjadi kewenangan pemerintah Provinsi, dan Daerah Irigasi dengan luas lebih kecil dari 1000 ha sepenuhnya menjadi kewenangan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/kota, sedangkan jika berada pada lintas kabupaten maka menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dalam pengelolaannya berjumlah 4 Daerah Irigasi, yaitu: 2 Daerah Irigasi Batanghari yang berada di Kabupaten Bungo dan 2 Daerah irigasi (Siulak Deras dan Sei Batang Sangkir). Daerah irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jambi sebanyak 5 Daerah irigasi, yaitu: DI Sei Suban yang terletak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, DI Sei Tanduk Batang Kuning yang berada di Kabupaten Bungo, DI Batang Limun Singkat di Kabupaten Sarolangun, dan DI Sei Batang Uleh di Kabupaten Bungo (Direktorat Jendral Sumberdaya Air, Kementerian PU. 2013). Secara total luas hamparan lahan sawah beririgasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat (Kementerian PU) seluas 14.429 ha atau 38 persen, Pemerintah Provinsi Jambi (Dinas PU Provinsi Jambi) seluas 7.933 ha atau 21 persen, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dinas PU Kabupaten/Kota) seluas 15.856 ha atau 42 persen (Bappeda Provinsi Jambi, 2013).

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten sampai kepada jaringan sekunder, sedangkan untuk jaringan tersier sepenuhnya merupakan tanggungjawab organisasi petani (P3A) dalam hal ini adalah masyarakat petani.

### 3.3. Pemanfaatan dan Permasalahannya

Pemanfaatan jaringan-jaringan irigasi dalam upaya mendukung peningkatan produksi padi di Provinsi Jambi, belum berlangsung optimal. Hal paling tidak dapat dilihat dari data yang terdapat pada tabel 5. Pada tabel 5 tersebut terlihat frekwensi penanaman 3 kali dari lahan yang beririgasi teknis dan semi teknis hanya 606 ha atau 4,27 persen, 2 kali setahun seluas 9.758 ha atau 68,72 persen, satu kali setahun 2768 ha atau 19,50 persen dari 14.200 ha lahan yang berpengairan teknis dan semi teknis. Selebihnya tidak ditanam (404 ha) dan sementara waktu tidak diusahakan (770 ha).

Tabel 4. Luas sawah irigasi berdasarkan frekwensi dan klasifikasi teknisnya

No.	Jenis Jaringan	Frekwensi tanam per tahun				SWTD <sup>b)</sup>	Jumlah
		3 kali	2 kali	1 kali	TDP <sup>a)</sup>		
1.	Teknis	178	2.218	650	110	279	3435
2.	Semi teknis	428	7.540	2.118	194	491	10771
3.	Sederhana	421	3.393	1.975	302	729	6820
4.	Desa non PU	146	9.322	5657	837	4352	20314
		1173	22473	10.400	1.443	5.851	41.340

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, 2011

Keterangan : a). Tidak ditanam padi

b). Untuk sementara waktu tidak diusahakan

Menurut Disperta Provinsi Jambi (2012) salah satu penyebab untuk sulitnya meningkatkan areal pertanaman padi melalui program intensifikasi dengan cara meningkatkan indeks pertanaman adalah terbatasnya sumber air. Hal ini dipertegas oleh Direktorat Jendral Sumber Daya Air (2011), yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir mengalami penyusutan debit air yang cukup berarti. Kurang berfungsinya jaringan irigasi, juga menjadi penyebab kurang optimalnya jaringan irigasi dalam memberikan dukungan terhadap proses peningkatan produksi padi di Provinsi Jambi.

Kurang berfungsinya jaringan irigasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama pada pembuatan rancang bangun jaringan irigasi hanya memperhitungkan debit air yang ada pada waktu rancang bangun jaringan irigasi dibuat, tidak atau belum memasukkan perhitungan estimasi debit air untuk beberapa waktu yang akan datang. Hal ini dapat dilihat pada kasus di Daerah Irgasi Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, menurut ketua Gapoktan dan Penyuluh Pertanian dan beberapa petani di Di Desa Sri Agung, pada tahun-tahun awal (semi teknis) beroperasinya debit air yang mengalir di jaringan irigasi Suban adalah cukup dan mampu mengairi seluruh hamparan sawah yang ada di Suban bahkan berlebihan. Pada kurun waktu 5 tahun terakhir, debit airnya berkurang sehingga dari 1.050 ha kapasitas, luas lahan yang terairi sepanjang tahun hanya berada pada kisaran luas 700 ha. Selebihnya hanya terairi dalam kurun waktu paling lama 4 bulan.

Hasil pengamatan (observasi) langsung kelapangan yang menyertakan pengurus Gapoktan, PPL dan pengurus kelompok tani setempat menjumpai adanya kerusakan pada semua saluran tersier yang diamati. Kerusakan yang dimaksud adalah keretakan-keretakan pada dinding dan lantai saluran.. Disamping keretakan-keretakan dinding dan lantai saluran, juga ditemukan adanya dindingsaluran yang ambrol pada dua saluran tersier. Bahkan pintu air yang berada di satu saluran tersier yang diamati tidak berfungsi lagi posisi tertutup sehingga debit air yang masuk ke saluran tersier yang dimaksud adalah kecil.

Hasil yang relatif sama juga didapatkan dari hasil pengamatan di Daerah Iirigari (DI) Sei Tanduk Batang Kuning yang berada di Kabupaten Bungo, dan Daerah Irigasi Sei Batang Sangkir di Kabupaten kerinci. Pada Daerah Irigasi Sei Tanduk Batang Kuning yang berada di Kabupaten Bungo, kondisinya lebih para dibandingkan dengan kondisi Jaringan irigasi Suban Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil pengamatan tersebut menjumpai kerusakan jaringan irigasi sudah dimulai dari saluran primer. Kerusakan yang dimaksud adalah amrolnya dinding saluran primer pada beberapa titik, pintu air tidak berfungsi bahkan beberapa peralatan tidak dijumpai atau “tidak terpasang”. Di Daerah Irigasi Daerah Irigasi Sei Batang Sangkir dijumpai adanya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada beberapa titik saluran sekunder dan tersier yang diamati.

Kerusakan - kerusakan yang terjadi ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan, sengaja dirusak oleh oknum-oknum pertain yang lahannya tidak mendapat air, kurang berfungsinya Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan atau Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, serta kurangnya rasa memiliki dari petani pada khususnya dan masyarakat setempat pada umumnya. Kerusakan-kerusakan ini umumnya telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, antara 2 sampai 5 tahun.

Kerusakan-kerusakan jaringan irigasi ini seharusnya tidak perlu berlangsung dalam waktu yang lama, bila semua pihak yang berkompeten melaksanakan tugas, kewajiban dan

wewenangannya dengan baik. Dalam hal ini, yang pertama dan utama yang harus melakukan perbaikan adalah P3A atau kelompok tani yang lahannya terdampak.

Menurut Ketua P3A Suban, kerusakan-kerusakan tersebut sebetulnya telah dilaporkan ke Dinas terkait dalam hal ini bila kerusakan terjadi pada saluran tersier pelaporannya ke Dinas Pertanian Setempat, bila terjadi pada saluran sekunder ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi melalui Satgas lapangan. Laporan kerusakan tidak di tanggapi dengan segera, yang terjadi umumnya tidak mendapat tanggapan. Secara pasti, jaringan irigasi yang fungsinya telah mengalami penurunan, belum didapatkab. Namun dari wawancara dengan pihak Dinas (bidang sarana dan prasarana) dan Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Pengairan) Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diperkuat dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara dengan beberapa petani pemakai air, didapatkan gambaran sekitar 25 % jaringan irigasi tidak berfungsi secara optimal, karena mengalami kerusakan bangunan dan terjadinya penurunan debit air. Akibatnya, sawah-sawah yang terletak pada bagian ujung tidak terairi.

Sebagai gambaran umum apa yang terjadi pada jaringan rigasi di Kabupaten Merangin. Jaringan irigasi di kabupaten ini, lebih dari 40 % dalam kondisi rusak sehingga jaringan irigasi yang ada tidak berfungsi secara optimal dalam upaya meningkatkan produksi padi di Kabupaten tersebut. Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Merangin disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Merangin, Tahun 2013.

Jenis irigasi	Kondisi		Jumlah (ha)
	Baik (Ha)	Rusak (Ha)	
1. Teknis	1.000	522	1.522
2. Semi Teknis	3.000	500	3.500
4. Irigasi Desa	3.000	4.000	7.000
Jumlah	7.000	5.022	12.022

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin (2013)

#### 5.2.4. Kebijakan dan Strategi Peningkatan kapasitas Jaringan Irigasi.

Air, merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses produksi tanaman, termasuk di dalamnya adalah tanaman padi. Dalam kaitannya dengan upaya pencapaian target dan sasaran peningkatan produksi padi baik dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi, tersedianya air bagi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman padi harus menjadi perhatian dengan skala tinggi.

Di Provinsi Jambi seperti yang diakui oleh Dinas Pertanian Tanaman Provinsi Jambi, salah satu kendala yang dihadapi dalam rangka meningkatkan indeks pertanaman padi adalah sumber air untuk pengairan terbatas, disamping sebagian jaringan irigasi yang ada tidak berfungsi secara optimal. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan wewenangannya pihak Dinas Pertanian Provinsi Jambi, pada tahun anggaran 2011 telah melakukan rehab jaringan irigasi tingkat usahatani (Jitut) dan jaringan irigasi desa (Jides), yang dibiayasi oleh dana APBN.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah provinsi Jambi, periode 2011 – 2015, terungkap bahwa untuk mendukung kegiatan proses produksi padi, Selama tahun 2006 –2009, telah terlaksana rehabilitasi jaringan irigasi untuk kawasan seluas rata-rata 1.694 Ha/ tahun, pembangunan untuk kawasan seluas rata-rata 264 Ha/tahun, serta operasi dan pemeliharaan untuk kawasan seluas rata-rata 5.948 Ha per tahun. Sedangkan untuk periode 2011-2015 dalam bidang pengairan pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan sasaran berupa terciptanya kualitas dan kesediaan jaringan irigasi, strateginya adalah dengan merehab dan membangun jaringan irigasi baru dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air sebagai pendukung system jaringan irigasi. Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah pengelolaan sumberdaya air dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, pendayagunaan sumberdaya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi dan Pendayagunaan sumberdaya air sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis

Peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pencapaian target peningkatan produksi padi dan beras. Oleh karena itu pengoptimalisasi jaringan irigasi harus mendapat perhatian yang besar. bentuknya rehabilitasi jaringan-jaringan irigasi yang rusak sehingga kapasitasnya dapat dinaikkan kembali. Disamping rehabilitasi jaringan yang rusak, perlu juga dilakukan pemetaan pada wilayah-wilayah yang telah ada jaringan irigasi untuk ditingkatkan klaisifikasinya, seperti jaringan irigasi semi teknis menjadi irigasi teknis, sehingga Indeks Pertanian minimal menjadi 250, jaringan irigasi sederhana menjadi jaringan irigasi semi teknis. Sistematika tersebut tidak kaku, melainkan tergantung dengan sumber air yang ada dan bila memungkinkan, bisa saja jaringan irigasi sederhana dan atau jaringan irigasi desa/non PU ditingkatkan menjadi jaringan irigasi teknis.

Rehabilitasi dan peningkatan status jaringan irigasi juga harus dibarengi dengan upaya yang terus menerus meleakukan pemeberdayaan kelompok tani baik secara berkelompok maupun gabungan kelompok yang membentuk P3A, serta peningkatan rasa memiliki dari petani dan kesadaran arti penting jaringan irigasi untuk keberlangsungan produksi padi.

## **VI. KESIMPULAN DAN IMPILKASINYA**

1. Provinsi Jambi memiliki lahan yang dapat dijadikan sebagai lahan sawah beririgasi cukup luas, yaitu 112.412 ha, yang telah dikembangkan sebagai lahan sawah beririgasi 52.184 ha. Berdasarkan wewenangnya, luas lahan sawah beririgasi yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat seluas uas 14.429 ha atau 38 persen, Pemerintah Provinsi Jambi seluas 7.933 ha atau 21 persen, dan Pemerintah Kabupaten/Kota seluas 15.856 ha atau 42 persen.
2. Pemanfaatan lahan-lahan sawah beririgasi belum optimal karena sebagian jaringan irigasi (25 %) yang ada mengalami kerusakan mulai dari keretakan-keretakan dinding dan lantai

dari saluran hingga tidak befungsinya lagi pintu-pintu air yang berperan untuk mengendalikan debit air yang masuk dan atau keluar dari saluran irigasi.

3. Rehabilitasi dan peningkatan status jaringan irigasi juga harus dibarengi dengan upaya yang terus menerus meleakukan pemeberdayaan kelompok tani baik secara berkelompok maupun gabungan kelompok yang membentuk P3A, serta peningkatan rasa memiliki dari petani dan penyadaran arti penting jaringan irigasi untuk keberlangsungan produksi padi

#### DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. 2006. Ekonomi Kelembagaan Pangan. LP3ES, Jakarta

Satrio, AB., S. Supardi., S. Wahyuningsih. 2012 Pengaruh Luas Lahan sawah Irigasi terhadap Produksi Beras di Indonesia. <http://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/Mediagro/article/view/903> dikases tanggal 6 Mei 2014.

Arintadisastra, S. 2001. Membangun Pertanian Modern. Yayasan Pembangunan Sinar Tani Indonesia, Jakarta.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi. 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi, 2011 – 2015. Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jambi, Jambi.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi. 2009. Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2008. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.

..... 2011. Penggunaan Lahan Tahun 2010. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.

....., 2013. Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2012. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Jambi.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi. 2013. Laporan Tahunan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Tahun 2012. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Jambi.

Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Merangin. 2013. Jenis dan Kondisi Jaringan Irigasi di Kabupaten Merangin, tahun 2011. <http://www.meranginkab.go.id/jaringan-irigasi.html>, diakses pada Tanggal 4 desember 2013.

Direktorat Jendral Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum 2012. Pengelolaan Daerah Alkiran Sungai Batanghari. Direktorat Jendral Sumnberdaya Air, Kementerian Pekerjaan, Jakarta.

Direktorat Pengelolaan Air, Kementerian Pertanian. 2014. Pedoman Teknis Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Direktorta Pengelolaan Air, Kementerian Pertanian, Jakarta.

Fajar, E. 2013. Kerusakan Irigasi Turunkan Produksi Beras.  
<http://www.tempo.co/read/news/2013/11/24/206532069/Kerusakan-Irigasi-Turunkan-Produksi-Bera>. diakses tanggal 6 Mei 2014.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2009. Rencana Strategis Kemnetrian Pertanian, Tahun 2009 – 2014.. Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta.

Saliem, HP., A. Purwoto., GS. Hardono., TB. Purwantini., Y. Supriyatna., Y. Marisa, dan Waluyo. 2005. Manajemen Ketahanan Pangan Era Otonomi Daerah dan Perum Bulog. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor

Simatupang, P., N. Syafaat, T. Pranadji, V.P.H. Nikijuluw, dan B. Rachman. 2002. Pembangunan Pertanian Sebagai Andalan Perekonomian Nasional *dalam* Analisis Kebijaksanaan: Pembangunan Pertanian Andalan Berwawasan Agribisnis. Monograf Series No. 23. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Tikno, S. 2000. Analisis Debit di Daerah Aliran Sungai Batanghari Provinsi Jambi.  
<http://wxmod.bppt.go.id/JSTMC/hpstm/VOL01/pdf/vol1no1-13.pdf>. diakses tanggal 4 mei 2014.